

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Penelitian ini terkait strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang sebelumnya telah banyak dilakukan dalam berbagai sudut pandang dan bentuk diplomasi ekonomi dan studi kasus yang berbeda-beda. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa pentingnya melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya peningkatan ekspor CPO ke Tiongkok.

Penulis membagi penelitian kedalam dua pokok bahasan diantaranya, Pola hubungan perdagangan Indonesia – Tiongkok, Diplomasi ekonomi Indonesia khususnya mengenai ekspor-impor CPO. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam memperoleh informasi penelitian.

Pertama, yang menjadi acuan penulis yaitu tulisan yang berjudul “Analisis Permintaan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia oleh Pasar Tiongkok” ditulis oleh Riyani, Darsono, Minar Ferichani (Riyani et al., 2018). Dalam tulisannya menjelaskan bahwa Selama kurun waktu 2012-2016, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok lebih didominasi oleh sektor non migas. Salah satu komoditas non migas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah komoditas pertanian. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor komoditas pertanian Indonesia kedua setelah India, dan komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada tahun 2016 adalah kelapa sawit yang mencapai US\$ 2,21 milyar. karet sebesar US\$ 401,02 juta, kelapa sebesar US\$ 222,81 juta dan kakao sebesar US\$ 68,23 juta (Badan Pusat

Statistik, 2017). Selama kurun waktu tahun 2012 sampai 2016, ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Tiongkok berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, demikian juga impor komoditas pertanian dari Tiongkok ke Indonesia. Surplus perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dengan Tiongkok mengindikasikan bahwa perdagangan komoditas pertanian ke Tiongkok masih menguntungkan, namun demikian ekspor komoditas pertanian yang cenderung mengalami penurunan perlu mendapatkan perhatian dan perlu diidentifikasi faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor merupakan upaya strategis guna mengevaluasi kinerja ekspor dan merumuskan upaya-upaya antisipasi(Lubis, 2010).

Beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor antara lain volume ekspor tahun sebelumnya, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan nilai tukar mata uang (Purnomowati et al., n.d.)Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor dapat menyebabkan daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor menurun sehingga berpengaruh terhadap menurunnya permintaan ekspor suatu negara.

Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia oleh Tiongkok adalah nilai tukar riil. Nilai tukar riil berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia oleh Tiongkok. Secara teori, depresiasi nilai Rupiah akan menyebabkan harga ekspor lebih murah sehingga meningkatkan permintaan ekspor, namun hasil penelitian ini menunjukkan depresiasi nilai Rupiah akan menurunkan permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia oleh Tiongkok.

Depresiasi nilai Rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan ekspor justru menurunkan permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia oleh

Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan kebijakan yang perlu dilakukan agar peningkatan ekspor Indonesia dapat terjadi. Permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia tetap meningkat meskipun terjadi kenaikan harga ekspor komoditas pertanian dan tarif impor komoditas pertanian di Tiongkok. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditas pertanian ekspor Indonesia ke Tiongkok memiliki daya saing dan dibutuhkan oleh Tiongkok untuk menjaga keberlangsungan proses industrinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas produk perlu terus dilakukan guna tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia. Penelitian ini akan menjadi salah satu referensi bagi penulis khususnya pada pembahasan faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor komoditas pertanian Indonesia oleh Tiongkok.

Kemudian literatur lainnya yang ditulis oleh Arisa Permata Siwi yang berjudul *Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA*. Penelitian ini membahas mengenai hubungan perdagangan Indonesia-China dalam kerangka ACFTA. Adanya perencanaan dalam kesatuan bidang ekonomi ASEAN, yaitu integrasi ekonomi yang diharapkan tercapai pada tahun 2015, salah satunya diwujudkan melalui penerapan kegiatan perdagangan bebas atau free trade oleh ASEAN. Penerapan free trade yang dilakukan tidak hanya dengan negara-negara ASEAN saja, melainkan juga dengan negara-negara diluar kawasan ASEAN seperti salah satunya ialah dengan Tiongkok. Penerapan free trade yang dilakukan oleh ASEAN dengan Tiongkok ini dikenal dengan sebutan ACFTA (ASEAN China Free Trade Area). Tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara masing-masing (Siwi, 2015).

Kemudian dilihat dari dinamika ekonomi Indonesia dan Tiongkok mengenai kondisi ekonomi kedua negara seperti istilah *emerging market* yang diberikan kepada

Indonesia tentunya disebabkan oleh berbagai macam keberhasilan yang diperoleh Indonesia dalam usahanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Negara ini dinilai memiliki daya tarik yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia yang kini menjadi negara tujuan utama bagi negara asing dalam mengembangkan lingkungan bisnis akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya kedepan. Selain dengan adanya peningkatan jalinan kerjasama dengan negara asing tersebut, faktor domestik juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Faktor domestik tersebut berupa sumber daya alam yang dimiliki melimpah, pengelolaan ekonomi yang pruden, meningkatnya jumlah kelas ekonomi mengena ke atas, besarnya konsumsi domestik yang dipengaruhi oleh sifat konsumtif penduduk Indonesia, serta jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 240 juta jiwa.

Kondisi perkembangan ekonomi Tiongkok tersebut menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. Ini menyebabkan negara-negara di dunia memiliki minat yang tinggi untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daya tarik Tiongkok bagi para pengusaha industri dan perdagangan sangatlah kuat dikarenakan ekonomi Tiongkok sendiri yang menjanjikan sehingga diharapkan dengan menjalin hubungan perdagangan bersama Tiongkok akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, saat ini Tiongkok menjadi salah satu aktor penting dalam hubungan kegiatan perdagangan internasional.

Berdasarkan hal tersebut dengan meningkatnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok terlebih karena adanya prinsip perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA yang semakin memudahkan terjadinya kegiatan ekspor impor kedua negara. Sinergi positif pada sektor ekonomi dari kedua negara inilah yang

kemudian dinilai oleh Indonesia sebagai salah satu bentuk keuntungan yang didapatkan dari hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Terlebih lagi karena pengaruh dari Tiongkok yang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok.

Selanjutnya, penulis menggunakan Literatur ditulis oleh Lisa Pratama yang berjudul “ Dampak ASEAN-CHINA *Free Trade Area* terhadap perkembangan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok”(Pratama, 2018). Didalam literatur ini menjelaskan bahwa dampak kerjasama ACFTA ini membawa positif terhadap perkembangan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok, dapat dilihat dari melalui jumlah ekspor CPO pertahun nya relatif meningkat. Faktor produksi yang berbeda antara Indonesia dan Tiongkok juga menyebabkan kedua melakukan kerjasama ini sehingga hubungan perdagangan kedua negara ini semakin erat. Melalui kerjasama perdagangan bebas ini diharapkan akan meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional sehingga dapat mempercepat aliran barang, jasa dan investasi. Dengan adanya ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) peluang pasar Indonesia ke Tiongkok tentunya mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya. Salah satu komoditi yang mengalami peningkatan adalah ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia ke Tiongkok. Dengan adanya peningkatan volume ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mengindikasikan bahwa Tiongkok memiliki potensi yang besar sebagai pasar ekspor CPO Indonesia.

Selanjutnya, penulis menggunakan literatur yang berjudul “Perubahan Kebijakan Kerjasama Indonesia – Tiongkok pada Masa Pemerintahan Jokowi (20014-2015)” yang ditulis oleh Okta Sari (Sari, 2017). Didalam literature riviui ini menjelaskan bahwa Hubungan bilateral Indonesia dengan negara RRT menunjukkan

perluasan dan pendalaman di bidang kerja sama. Kemitraan ini yang merupakan suatu pendekatan yang mensinergikan potensi yang dimiliki oleh negara-negara yang termaksud dengan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan setara. Dalam kaitan ini, maka kemitraan strategis Indonesia mencakup negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai salah satu mitranya. Hubungan yang dijalani oleh Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif. Pola interaksi saling menguntungkan ini terus berulang dalam evolusi hubungan bilateral keduanya. Dari pembahasan ini, dimana penulis melihat dari kebijakan yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, mitra kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Pada saat era SBY, Tiongkok bukan merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, dan bermula pada pertengahan tahun 2014 hingga sekarang dimana pada masa pemerintahan Jokowi, Tiongkok merupakan negara yang menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dan menjadi negara paling berpengaruh bagi Indonesia.

Ketergantungan perekonomian yang dialami Indonesia terhadap Tiongkok ini membuat Indonesia dapat meningkatkan perekonomiannya. Di tengah lemahnya perekonomian Tiongkok, Indonesia masih melihat negara tersebut sebagai pasar ekspor besar yang menguntungkan. Hal tersebut terbukti dari Indonesia yang masih terus mempromosikan barang ekspornya di pasar Tiongkok untuk meningkatkan ekspor dan mendukung perekonomiannya, dalam pameran Tiongkok-ASEAN Expo 2015.

Kemudian, penulis menggunakan literatur buku yang ditulis oleh Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, Oscar Fernando, Michelle Limenta, Sianti Candra yang berjudul "Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan

Investasi”(Jemadu et al., 2015). Dalam penelitian ini membahas mengenai diplomasi ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi yang mencakup, namun tidak terbatas pada. kegiatan ekspor dan impor, pinjaman dan bantuan luar negeri, perdagangan internasional dan investasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya mulai menyadari bahwa selama ini diplomasi Indonesia- terlalu terpaku pada urusan politik dan keamanan, sehingga dimensi ekonomi agak terabaikan. Sesungguhnya dimensi ekonomilah yang secara nyata membuat diplomasi terkoneksi langsung dengan kepentingan rakyat. Jika diplomasi ekonomi hcrmasalah maka kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional akan dirugikan dan akibatnya rakyat Indonesia harus dikorbankan(Jemadu et al., 2015).

Mengingat kompleksitas diplomasi ekonomi yang semakin tinggi patut dipertimbangkan usul dari Makmur Keliat, ahli hubungan internasional dari Universitas Indonesia, agar dibentuk apa yang disebut New Diplomatic Intelligence Unit yang memenuhi empat syarat berikut. Pertama, unit ini harus memiliki akses terhadap first hand and credible information tentang suatu isu perdagangan atau investasi tertentu sehingga bisa menghasilkan analisis yang akurat bagi pembuat kebijakan. Kedua, unit tersebut harus mampu menghasilkan risk and vulnerability analysis untuk mencegah penandatanganan suatu perjanjian perdagangan internasional yang ternyata di kemudian hari sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia dan pemerintah kesulitan untuk menemukan exit strategy. Ketiga, unit tersebut harus menggunakan *cross sectoral or cross-issue approach* untuk menghasilkan rekomendasi policy alignment yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Dalam konteks ini pelibatan epistemic community yang mumpuni

dalam issue perdagangan dan investasi mutlak perlu sehingga rekomendasi kebijakan yang diusulkan dapat dipertanggungjawabkan validitas dan akurasinya. Keempat, unit ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga permanen dan karena itu sifatnya ad hoc, sangat bergantung pada issue hangat yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan membutuhkan jawaban yang tepat (Keliat, 2015).

Diplomasi ekonomi Indonesia memang perlu dioptimalkan karenanya dalam kaitan dengan penataan kelembagaan diplomasi ekonomi ada beberapa catatan yang perlu disampaikan di sini berdasarkan tantangan yang kita hadapi dalam penanganan ketiga isu di atas. Pertama, Indonesia menghadapi tantangan diplomasi ekonomi yang semakin rumit khususnya yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan dan produk ramah lingkungan. Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak diplomasi tidak didisain untuk menjawab tantangan-tantangan ini secara spesifik karena tugas kelembagaannya yang bersifat umum dan expertise yang bersifat teknis tidak tersedia di lembaga ini. Kedua, secara resmi Kementerian Luar Negeri ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kacamatan sehingga tidak mungkin bisa membawa isu diplomasi ekonomi ke rapat koordinasi dalam bidang ini. Untuk itu Kementerian Luar Negeri harus memiliki akses ke rapat koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian sehingga bisa membawa isu diplomasi ekonomi serta merumuskan posisi dan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu ketahanan pangan dan produk ramah lingkungan di berbagai forum perundingan multilateral.

Ketiga, perkembangan rezim internasional yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan, produk ramah lingkungan dan penyelesaian sengketa negara dengan investor asing membuat kita semakin sadar perlunya grand design diplomasi ekonomi sebagai strategi globalisasi dan regionalisasi Indonesia sehingga bisa

menjadi acuan yang sama bagi setiap instansi yang menjadi focal point dalam menyikapi isu apapun di forum internasional.

Adapun tantangan diplomasi ekonomi terhadap perjanjian perdagangan internasional dan investasi yang perlu dievaluasi. Pertama, sejak kemerdekaan sampai sekarang isu ketahanan pangan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian yang tinggi dari pemerintah selain untuk menjamin pasokan pangan dalam negeri demi ketahanan pangan juga untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia di lembaga perdagangan multilateral seperti WTO. Kedua, dalam menganalisis dampak perdagangan global terhadap ketahanan pangan Indonesia, penelitian ini telah mengarahkan perhatian kita pada antisipasi terhadap perkembangan Putaran Doha. Sepanjang menyangkut kepentingan Indonesia seandainya kesepakatan dalam Putaran Doha tercapai maka hal itu akan berdampak luas terhadap kebijakan yang protektif dan nasionalistik di bidang pangan.

Ketiga, berkaitan dengan promosi produk ramah lingkungan rupanya tantangan diplomasi ekonomi Indonesia di forum multilateral seperti WTO tidak lebih ringan dan bahkan peluang keberhasilannya agar produk CPO kita bisa diterima sebagai *Environmental goods* sangat kecil. Keempat, penelitian ini juga mencatat hancurnya kelemahan domestik yang sesungguhnya dalam kapasitas pemerintah Indonesia untuk mengatasinya tetapi kenyataannya malah menjadi sumber liability utama dalam diplomasi ekonomi terkait isu lingkungan hidup. Kelima, berdasarkan perkembangan penyelesaian sengketa investor asing dengan pemerintah negara penerima (host country) dan bertolak dari pengalaman Indonesia akhir-akhir ini, Indonesia memiliki kekhawatiran yang masuk akal terhadap menguatnya posisi dan kapasitas investor asing serta negara maju dalam penyelesaian sengketa seperti ini.

Keenam, Analisis dan penelitian ini mengungkapkan bahwa investor asing selalu bisa menemukan mekanisme untuk menuntut pemerintah Indonesia tatkala mereka merasa dirugikan oleh kebijakan regulasi ekonomi kita. Selain itu Indonesia juga sudah mengikatkan diri dengan berbagai perjanjian internasional khususnya via organisasi regional ASEAN yang mencakup penyelesaian sengketa investasi. Ketujuh, dari evaluasi terhadap perjanjian perdagangan dan investasi yang terkait dengan ketiga isu yang menjadi fokus dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diplomasi ekonomi hendaknya tidak lagi dilihat sebagai aktivitas tambahan atau sampingan dengan pendekatan yang bersifat *ad hoc* dan hanya menjadi hirauan dari Kementerian Luar Negeri melalui Kelompok Kerja yang sudah dibentuk. Sebaliknya diplomasi ekonomi harus merupakan rencana strategis nasional yang dituangkan dalam *Globalization strategies* sehingga bisa menjadi pedoman untuk setiap perjanjian perdagangan dan investasi yang mau ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Literatur selanjutnya yang berjudul “ Analisis perdagangan Indonesia Pasca Pemberlakuan ACFTA (Studi Komparatif Indonesia-China)” yang ditulis oleh Muslikhati (Muslikhati & Kaluge, 2010). Dalam literatur ini menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan dampak yang positif dimana Net Ekspor atau Ekspor riil dapat menunjang kenaikan atau pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya GDP.

Dari hasil penelitian ini didapat bahwa untuk Negara Indonesia adanya kenaikan net ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan GDP, sedangkan GDP tidak berpengaruh terhadap kenaikan net ekspor atau ekspor riil. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar dunia sangat berpengaruh terhadap permintaan barang domestic, adanya kenaikan permintaan pasar dunia terhadap

produk domestic mampu meningkatkan pendapatan Negara dengan meningkatkan GDP, namun sayangnya kondisi ini tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sector riil, misalnya tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya anggaran dalam hal ini modal yang dapat membantu industri dengan restrukturisasi permesinan, kemudahan birokrasi, dan wmeningkatkan kinerja perbankan dalam mendukung produksi dengan memberikan kredit dengan bunga yang ringan sehingga biaya yang dikeluarkan sector riil dalam membiayai permodalan menjadi lebih ringan (Muslikhati & Kaluge, 2010).

Kemudian penulis menggunakan Jurnal sebagai acuan yang ditulis oleh Sry March Lely Turnip, Suharyono. Dan M. Kholid Mawardi yang berjudul “Analisis Daya Saing *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia di pasar Internasional”. Jurnal ini bertujuan untuk mengukur tingkat keunggulan komparatif, kompetitif, posisi ekspor CPO Indonesia, dan faktor – faktor pendukung daya saing CPO Indoneisa di pasar Internasional dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Penelitian ini menyatakan bahwa CPO indonesia memiliki keunggulan komparatif diatas rata-rata dunia dilihat dari perhitungan indeks RCA nya selama periode 1994-2014 ialah lebih besar dari 1, yanisebesar 66,12. CPO Indonesia memiliki daya saing yang paling kuat di pasar internasional dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kemudian faktor – faktor yang mendukung daya saing CPO Indonesia dalam perdagangan dunia adalah yang pertama, faktor produksi yaitu tersedianya lahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yaitu: Sumatera, Jawa, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan suhu,caahaya, curah hujan yang mendukung untuk memproduksi kelapa sawit ; tersediannya sumberdaya manudia dalam jumlah yang besar dan murah ; rendahnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sawit serta kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan

bahan pendukung di dalam negeri. Kemudian yang kedua, tersedianya industri pendukung dan terkait yaitu: industri penyedia bibit kelapa sawit, industri penyedia tandan buah segar, dan industri pengolah kelapa sawit di dalam negeri (Turnip et al., 2016)

Kemudian penulis menggunakan bahan acuan dari jurnal yang ditulis oleh Agung Prasetyo, Sri Marwanti, dan Darsono yang berjudul “Keunggulan komparatif dan kinerja ekspor minyak sawit mentah Indonesia di pasar Internasional”. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekspor minyak sawit mentah (*Crude Palm oil*) Indonesia tahun 2001-2015 adalah 11,94% per tahun, jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Kolombia yang tumbuh masing-masing sebesar 59,55%, 25,19%, dan 20,35% per tahun. Kondisi ini diperburuk dengan pemberlakuan pajak tinggi atas CPO Indonesia di UNI Eropa pada tahun 2012 sehingga mendorong Indonesia mengalihkan fokus ekspor CPO ke India, China, dan Pakistan. Penelitian ini menunjukkan nilai indeks RCA menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, Kolombia dan Thailand memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan produsen CPO lain di Dunia. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Kolombia, rata-rata nilai indeks RCA Indonesia menunjukkan nilai terendah. Rendahnya RCA Indonesia ini dipengaruhi oleh besarnya konsumsi CPO di Indonesia yang mencapai 8,62 juta metrik ton dengan tingkat pertumbuhan 7,41% /tahun pada akhir tahun 2015. Besarnya konsumsi CPO Indonesia menyebabkan kebijakan pemerintah Indonesia hanya tefokus pada stabilisasi harga CPO di dalam negeri untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Kemudian disebabkan juga dengan adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2004 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008. Kemudian pada aspek distribusi pasar, Indonesia dan

Malaysia memiliki posisi pasar yang baik di India dan Belanda, tapi memiliki efek distribusi pasar yang kurang baik di Tiongkok dan Pakistan. (Prasetyo et al., 2017)

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor CPO diperlukan adanya distribusi pasar CPO yang lebih baik. Dalam penelitian penulis akan mencari bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok.

Kemudian penulis menggunakan literatur revidu dengan judul “Trend Produksi Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia” yang ditulis oleh Andi Alatas. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tren produksi kelapa sawit, trend nilai produksi, tren volume ekspor, trend nilai ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) Indonesia, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia untuk mengetahui keunggulan CPO Indonesia. (ALATAS, 2015).

Jurnal ini mengatakan bahwa areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perluasan, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap produksi dan nilai produksi kelapa sawit Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan meningkatnya produksi CPO, Indonesia meningkatkan volume ekspor CPO ke beberapa Negara. Ekspor CPO ke Negara Tiongkok dipengaruhi oleh Harga CPO Internasional, Pendapatan perkapita, harga substitusi, dan jumlah penduduk.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi dari jurnal yang ditulis oleh Tuti Ermawati, Yeni Saptia yang berjudul Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Ermawati & Saptia, 2013). Kajian ini menganalisis kinerja ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) Indonesia diantara negara-negara produsen kelapa sawit, dan kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia ke beberapa

negara tujuan ekspor utama. Metode analisis yang digunakan adalah indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Constant Market Share (CMS). Berdasarkan hasil analisis RCA menunjukkan bahwa kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, tetapi sama dengan Colombia. Sementara hasil dari analisis CMS, kinerja ekspor CPO dan PKO cenderung menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia. Di samping itu, parameter dari efek komposisi produk, efek distribusi pasar maupun efek daya saing, masih banyak yang bernilai negatif. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor baik CPO maupun PKO adalah kebijakan yang mendukung pengembangan ekspor CPO maupun PKO dengan mempertimbangkan daya saing hilirisasi industri sawit, peningkatan kualitas CPO dan PKO yang sesuai dengan standar negara yang menjadi tujuan ekspor.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar daya saing dan kinerja minyak kelapa sawit dapat meningkat, antara lain: Pertama, perlu adanya sinergitas kebijakan pemerintah yang mendukung daya saing hilirisasi industri sawit. Kedua, Indonesia lebih memperhatikan komposisi produk CPO dan PKO sesuai dengan kebutuhan negara-negara pengimpor dengan meningkatkan kualitas CPO dan

PKO yang sesuai dengan standarisasi negara yang menjadi tujuan ekspor. Ketiga, Indonesia harus lebih teliti dalam mengekspor produk CPO maupun PKO dengan memperhatikan dinamika impor di negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat, selama ini distribusi pasar Indonesia lemah karena kurangnya market intelligence para eksportir.

Kemudian penulis menggunakan literatur yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik yang berjudul “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2015”(Badan Pusat Statistik, 2015). Penelitian ini memuat data dan ulasan ringkas tentang perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit yang dirinci menurut status pengusahaannya yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta menurut provinsi. Perkembangan ekspor dan impor kelapa sawit Indonesia disajikan menurut jenis komoditas dan negara tujuan/asal. Selain itu juga disajikan data perkembangan produksi kelapa sawit dunia dan perkembangan impor kelapa sawit dunia.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama enam tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 2,77 sampai dengan 11,33 persen per tahun. Demikian halnya dengan luas areal kelapa sawit, perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dari tahun 2010 sampai dengan 2015 meningkat sekitar 5,39 sampai dengan 8,42 persen per tahun. Pada tahun 2010 produksi minyak sawit (CPO) sebesar 22,50 juta ton, meningkat menjadi 29,28 juta ton pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan 30,14 persen. Tahun 2015 diperkirakan produksi minyak sawit (CPO) akan meningkat menjadi 31,28 juta ton atau sebesar 6,85 persen

Pada tahun 2015, urutan volume ekspor minyak sawit adalah Other Palm Oil sebesar 66,04 persen dari total ekspor, Crude Palm Oil sebesar 27,53 persen, Other Palm Kernel Oil sebesar 4,29 persen dan Crude Oil of Palm Kernel sebesar 2,14 persen. Total ekspor minyak kelapa sawit enam tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan berkisar antara 0,08 sampai dengan 16,06 persen per tahun. Pada tahun 2010 total volume ekspor mencapai 17,86 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 15,20 milyar, meningkat menjadi 28,29 juta ton pada tahun 2015 dengan total nilai sebesar US\$ 16,95 milyar. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar

diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia.

Dari beberapa literatur yang telah dijelaskan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok melalui perdagangan internasional melalui pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor yang dapat memeberikan peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Tiongkok khususnya komoditas CPO. Tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. salah satunya dengan adanya penghapusan tarif sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir hambatan ekspor-impor. Selain itu kopleksitas diplomasi ekonomi, kondisi pasar internasional, nilai tukar mata uang, jumlah penduduk, volume ekspor tahun sebelumnya dan pendapatan per kapita , daya saing dari produsen lain dapat mempengaruhi volume ekspor. Oleh karena itu,upaya peningkatan kualitas produk perlu terus dilakukan guna tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing komoditas CPO Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, terutama skripsi penulis membutuhkan kerangka teoritis/konseptual sebagai sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritis tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan sebelumnya. Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian dapat membantu menjelaskan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan karena uraian dalam kerangka teoritis akan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti. Sebagai

pedoman untuk menganalisis isu penelitian, maka kerangka teoritis berisi teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian. Dalam hal ini, tentunya teori-teori yang ada dalam kajian ilmu hubungan internasional menjadi kerangka teoritis yang digunakan penulis sebagai alat analisis isu penelitian ini.

2.2.1 Teori Hubungan Internasional

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Hubungan Internasional sebagai teori utama untuk membantu menjelaskan penelitian ini. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Dougherty & Jr, 2008).

Dalam hal ini penulis pertama mengambil pengertian hubungan internasional seperti yang dikemukakan Menurut K.J Holsti definisi Hubungan Internasional, yaitu:

Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat oleh pemerintah atau warganegara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap Politik Luar Negeri atau Politik Internasional, dan meliputi segala segi hubungan antar berbagai Negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Transportasi, Komunikasi dan Perkembangan Nilai-nilai dan Etika Internasional (Holsti, 1987).

Berdasarkan pengertian Hubungan Internasional menurut K.J Holsti diatas sejalan dengan penelitian penulis bahwa adanya interaksi diantara masyarakat oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dan dalam pengkajiannya meliputi segala segi hubungan antar berbagai negara yang salah satunya mengenai perdagangan internasional. Khususnya dalam penelitian ini yang mengkaji mengenai peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok sebagai salah satu bentuk aktifitas perdagangan internasional

2.2.2 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi adalah komunikasi formal yang dilakukan oleh suatu Negara dengan pihak lain diluar negara . Hal ini dapat berupa negara lain, Negara-negara lain, ataupun kumpulan berbagai Negara yang tergabung dalam suatu organisasi. Diplomasi adalah pelaksanaan dari politik luar negeri suatu Negara. Diplomasi haruslah dilakukan dengan mengikut sertakan kementerian luar negeri Negara yang bersangkutan, agar memperoleh otoritas sebagai bagian dari politik luar negeri. Namun hal ini tidak harus berarti bahwa aktivitas antar pihak dari dua Negara yang menyertakan kementerian luar negeri langsung menjadi bagian dari diplomasi. Tanpa agenda yang terkait dengan politik luar negeri sebagai strategi maka hal ini adalah sekedar aktivitas antar bagian dari dua Negara. Diplomasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya pertahanan keamanan dan politik, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian ini diplomasi akan difokuskan pada dimensi ekonomi. Diplomasi ekonomi diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan dalam kerjasama antar dua Negara untuk memperoleh hasil-hasil ekonomi yang akan dapat dinikmati oleh keduanya. Hal ini biasanya meliputi berbagai upaya dibidang pemberdayaan perdagangan dan investasi(Hocking et al., 2012).

Diplomasi ekonomi berkaitan dengan segala kepentingan nasional dalam sektor ekonomi, seperti perdagangan luar negeri, hubungan dalam impor dan ekspor, kerjasama beserta perjanjian perdagangan, serta investasi (Arystankulova, 2018), maka dari itu dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan upaya dari sebuah negara dalam menjalankan dan mengkomunikasikan *interest*-nya melalui media diplomasi. Jika kemudian memfokuskan pada bagaimana diplomasi ekonomi ini dijalankan tidak akan terlepas dari kapabilitas suatu negara dalam mempertimbangkan potensinya untuk menggunakan segala aspek yang masuk ke dalam ranah ekonomi tersebut dalam menunjang kepentingan serta kesejahteraan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena diplomasi ekonomi menjadi sebuah bentuk kebijakan luar negeri yang dikeluarkan melalui proses penyusunan kebijakan yang melihat tidak hanya evaluasi aspek ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara yang kemudian dikembangkan. Namun pula bagaimana peluang serta tantangan yang memiliki kemungkinan untuk dihadapi, sehingga negara tersebut bisa memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai dan memaksimalkan potensi dari segala hal yang termasuk ke dalam sektor ekonominya (delanova olivia, 2019)

Diplomasi ekonomi berkaitan dengan bagaimana suatu negara membuat dan mengambil keputusan dengan penggunaan instrumen ekonomi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi melalui penyebaran pengaruh terhadap situasional maupun kebijakan ekonomi yang ada negara lain maupun organisasi internasional tertentu (Arystankulova, 2018). Yang berarti bahwa diplomasi ini menekankan bagaimana atensi negara terhadap kepentingan ekonomi diprioritaskan dalam melakukan Hubungan internasional dengan pihak-pihak tertentu.

Diplomasi ekonomi memiliki agenda yang komprehensif sebab berkaitan dengan perdagangan luar negeri, hubungan impor dan ekspor, kerjasama beserta perjanjian perdagangan, peluang investasi, serta komunikasi kepentingan nasional setiap negara dalam ranah ekonomi. Melihat bahwa setiap negara memiliki *interest* yang berbeda dalam menyusun dan menetapkan bagaimana diplomasi ekonomi akan dilaksanakan. Suatu negara kemudian melihat dan menyesuaikan kapabilitas yang dimilikinya untuk menggunakan peluang yang ada agar kepentingan ekonominya dapat dimaksimalkan melalui media diplomasi ekonomi untuk kesejahteraan negara tersebut (delanova olivia, 2019).

Menurut van Bergeijk & Moons, diplomasi ekonomi mengandung tiga elemen, yakni:

- a) Penggunaan pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan dan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi,
- b) Pemanfaatan aset - aset ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan,
- c) Upaya untuk mengkonsolidasikan iklim politik dan lingkungan internasional untuk mencapai tujuan - tujuan ini. (van Bergeijk & Moons, 2007)

Diplomasi memiliki tujuan yang berbeda yang dilakukan oleh negara, seperti *business*, dan oleh NGOs. Diplomasi ekonomi yang dilakukan negara ditujukan untuk meraih pencapaian-pencapaian dibidang investasi asing langsung dan perdagangan (teks aslinya adalah “FDI and *Economic Multilateralism*”). Pelaku bisnis domestik dan internasional akan mentargetkan “*transnational business*

development". Sedangkan NGOs akan sangat hirau kepada "*socio-economical/ecological development policies*"(palgrafe, n.d.)

Diplomasi ekonomi menjadi semakin penting karena adanya beberapa faktor(Baranay, 2009). Pertama adalah proses internasionalisasi yang ditandai oleh merebaknya integrasi regional dan global. Kedua adalah menguatnya liberalisasi ekonomi domestik sehingga interaksi melalui perdagangan dan investasi internasional menjadi makin intens. Ketiga adalah makin kuatnya keinginan perusahaan domestik untuk melebarkan aktivitasnya menjadi MNCs. Keempat adalah melemahnya autarchy disatu pihak dan menguatnya keterbukaan ekonomi, dimana keduanya dibarengi dengan ketersediaan metode baru dalam manajemen dan teknologi yang kesemuanya mendorong pada peningkatan hubungan antar negara dan organisasi internasional.

Jika mengarah pada apa yang telah dijabarkan dalam konsep diplomasi ekonomi diatas maka segala upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia khususnya dalam meningkatkan volume ekspor CPO Indonesia dalam bentuk kerjasama, hubungan ekspor-impor, peningkatan produktivitas ekspor CPO, pemberdayaan perdagangan adalah untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan ekonomi Indonesia.

Diplomasi ekonomi yang merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional tidak akan terlepas dari kapabilitas suatu negara dalam mempertimbangkan potensinya untuk menggunakan segala aspek yang masuk ke dalam ranah ekonomi tersebut dalam menunjang kepentingan serta kesejahteraan negara. Adapun langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kerjasama perdagangan dengan Tiongkok, pelaksanaan perjanjian perdagangan,

pembuatan kebijakan untuk menunjang produk CPO agar dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini digunakan agar dapat meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok serta mendukung penelitian penulis.

2.2.3 Teori Kerjasama Internasional

Salah satu bentuk ketergantungan antara aktor-aktor dalam hubungan internasional diwujudkan melalui sebuah kerjasama dimana kerjasama tersebut bisa melibatkan berbagai aktor dalam hubungan internasional, baik itu negara, organisasi, maupun individu.

Lebih lanjut, dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional, di mana dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dipenuhi didalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang uniteral dan kompetitif(Dougherty & Jr, 2008).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan.

Dengan kata lain kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beranekaragaman sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.(Dougherty & Jr, 2008).

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain(Holsti, 1995)

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan

lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ;

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”(Krisna, 1993).

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara. Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri.

Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah

saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama(Holsti, 1988).

Pendapat Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama. Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional(May rudy, 2002).

Kerjasama internasional dapat terwujud atas dasar kepentingan yang sama dan bekerja atas prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional perlu bagi setiap

negara. Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat dalam negeri. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan antar negara (Dam, 1996).

Merujuk pada teori kerjasama internasional sejalan dengan penelitian penulis, bahwa dengan adanya alasan dilakukannya kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi suatu negara, meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya dan untuk meraih keuntungan. Hal ini terbukti salah satunya dalam kerjasama ACFTA dimana adanya penghapusan tarif sebagai salah satu upaya pengurangan hambatan. Tentunya dengan adanya upaya penghapusan tarif tersebut dapat memberikan keuntungan terhadap kerjasama bilateral yang dijalin kedua negara didalamnya. Selain itu dengan adanya pelaksanaan kerjasama bilateral ini dapat meningkatkan hubungan yang baik antara kedua negara sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perdagangan dan peningkatan ekonomi Indonesia maupun Tiongkok.

2.2.5 Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan

impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2001).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 1999).

Dalam perdagangan internasional, suatu negara akan berupaya untuk mencapai neraca perdagangan surplus dengan mengekspor produk sebesar-besarnya dan membatasi impor dengan maksud untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya yang merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara (Basri & Munandar, 2010). Maka, tergambar bahwa peran negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi sangat dominan.

Menurut Salvatore (2007), salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional (Salvatore, 2007).

Guna meningkatkan kinerja Perdagangan Internasional, ekspor impor merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan karena dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Selain itu, hasil analisis yang diperoleh juga menunjukkan bahwa variabel perubahan nilai ekspor dipengaruhi oleh perilaku

masa lalunya. Dalam jangka pendek, perubahan nilai ekspor pada lag pertama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan nilai ekspor pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor satu triwulan sebelumnya cenderung akan mendorong peningkatan ekspor triwulan berikutnya atau dengan kata lain ekspor pada periode sebelumnya dapat menjadi stimulus yang baik untuk memacu peningkatan ekspor pada periode sekarang (Fitriani, 2014).

Dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia, Pemerintah telah melakukan perjanjian kerja sama perdagangan regional dan internasional, baik kerja sama bilateral maupun multilateral. Umumnya sifat kerja sama perdagangan internasional ini adalah blok pasar, perluasan pasar melalui *Free Trade Agreement* (FTA), dan pertukaran potensi ekonomi (*Comprehensive Economic Partnership – CEP*).

Saat ini, Indonesia mengembangkan lima sektor industri sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. Kelima sektor tersebut adalah industri pertambangan minyak dan gas, agribisnis dan perikanan, industri unggulan Indonesia, industri padat karya, serta industri pariwisata dan kreatif. Pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dan dukungan pengembangan kelima sektor tersebut untuk orientasi ekspor (Zaroni, 2018).

Melalui pemaparan mengenai konsep perdagangan internasional penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan elemen terkait untuk meningkatkan transaksi perdagangan dengan subyek ekonomi dalam penelitian ini yaitu Tiongkok. Dalam kenyataannya Indonesia sudah melakukan upaya untuk perluasan pangsa pasar dengan melakukan kerjasama perdagangan bebas (*Free Trade Area*) dalam kerangka ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) dimana Indonesia telah bergabung sejak 2010. Tentunya Indonesia

harus melaksanakan kerjasama perdagangan ini secara optimal agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mencapai kepentingan nasional. Dengan mengikuti kerjasama perdagangan bebas ini tentunya peluang untuk meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok akan terbuka lebar terbukti dengan adanya data dan fakta bahwa ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Tiongkok meningkat dari tahun 2017-2019.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikembangkan diatas maka penulis membuat sebuah Hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya. Maka dari itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan melakukan diplomasi ekonomi berupa kerjasama dalam kerangka ACFTA, partisipasi dalam *China International Import Expo*, kebijakan *Indonesia Sustainability Palm oil* dan *Kontribusi Indonesia Palm Oil Association* (GAPKI), maka diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia berhasil meningkatkan volume ekspor CPO ke Tiongkok.”

2.4 Operasionalisasi Variable Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
-------------------------------------	---------------------	-----------------------

<p>Variabel bebas:</p> <p>Dengan melakukan diplomasi ekonomi berupa kerjasama bilateral antara Indonesia - Tiongkok dalam kerangka ACFTA, berpartisipasi dalam <i>China International Import Expo</i> dan kebijakan <i>Indonesia Sustainability Palm oil</i></p>	<p>1. Pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia – Tiongkok dalam kerangka ACFTA</p> <p>1. Berpartisipasi dalam <i>China International Import Expo</i></p> <p>2. Dorongan pemerintah Indonesia dengan adanya sertifikasi <i>Indonesia</i></p>	<p>1. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china</p> <p>2. Partisipasi Indonesia pada <i>The 2 nd China International Import Expo</i> (CIIE) 2019 yang digelar di Shanghai, Tiongkok pada 5-10 November 2019 membukukan nilai transaksi sebesar US\$ 4,1 miliar. https://nasional.kontan.co.id/news/ikut-pameran-di-china-indonesia-berhasil-raih-transaksi-sebesar-us-41-miliar</p> <p>3. ISPO membuktikan bahwa kelapa sawit di Indonesia telah <i>sustainable</i> dan Indonesia</p>
--	---	--

	<p><i>Sustainability Palm Oil</i></p> <p>3. Kontribusi Gapki</p>	<p>juga peduli terhadap <i>sustainable</i></p> <p>https://www.undp.org > dam > undp > library > Indonesia Factsheet pdf</p> <p>Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disebut GAPKI yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif serta memfasilitasi dan melakukan advokasi dalam penyelesaian yang dihadapi oleh industri kelapa sawit.</p> <p>https://gapki.id/news/3875/peran-strategis-sawit-rakyat-indonesia</p>
<p>Variabel terikat:</p> <p>Maka diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia berhasil meningkatkan volume ekspor CPO ke Tiongkok.</p>	<p>1. Adanya peningkatan volume ekspor CPO ke Tiongkok pada tahun 2017-2019</p> <p>2. Peningkatan produktivitas dan</p>	<p>1. Volume ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/market/20190808140711-17-90691/ekspor-ke-china-naik</p> <p>https://gapki.id/news/4140/refleksi-industri-kelapa-sawit-2017-dan-prospek-2018</p> <p>https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019</p>

	<p>nilai harga CPO Indonesia.</p> <p>3. Perluasan lahan untuk pengembangan produktivitas CPO Indonesia</p>	<p><u>2.Pertumbuhan produksi CPO Indonesia</u> pada tahun 2018 mencapai 43,1 juta ton dan PKO sebesar 4,28 juta ton. Produksi minyak sawit di 2017 pun meningkat hingga 7 juta ton dibandingkan 2016. Dan juga adanya peningkatan nilai haraga terhadap CPO Indonesia.</p> <p>https://industri.kontan.co.id/news/tembus-518-juta-ton-produksi-minyak-sawit-indonesia-tumbuh-9-di-tahun-2019?page=all</p> <p>https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/160213126/tahun-2017-produksi-minyak-sawit-indonesia-naik-18-persen</p> <p>3. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah menjadi 14,68 juta hektare, atau bertambah hampir 50 kali lipat. Bahkan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi perhitungan luas tutupan kelapa</p>
--	--	---

		<p>sawit nasional pada 2019, angkanya lebih besar lagi yakni 16,38 juta hektare.</p> <p>https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional</p> <p>https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=229</p> <p>http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/167005-[Konten]-Konten%20D1891.pdf</p>
--	--	---

2.5 Skema Kerangka Penelitian



